

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Susanto. (2016). *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian Dalam Dimensi Ontologis, Epitomologis, dan Aksiologis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agraldo, Maarthen, Herlyanty. (2025). *Optimalisasi Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Lex Crimen. Vol (13). No, 1
- Alba-Juez L. (2009). *Perspective on Discourse Analysis*. Newcastle: Cambridge Scholar
- Amsal Bakhtiar. (2012). *Filsafat Ilmu, Edisi Revisi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Artidjo Alkostar. (2008). *Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Varia Peradilan: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), ISSN No. 0215-0247, Tahun ke XXIII No. 275
- Brenda Grantland. (2009). *Asset Forfeiture: Rules and Procedures*. Diakses pada tanggal 16 Desember 2025
- Bryan Garner. (1999). *Black's Law Dictionary (7<sup>th</sup> Edition)*. MN : West Group, St. Paul
- Efi Lalila Kholis. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing
- Fathin Abdullah, Triono Eddy, and Marlina. (2021). *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. (9) No.20

- Ian Smith, Tim Owen, *et. al.* (2003). *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*. United Kingdom: Reed Elsevier Ltd
- Ilmi, M., Muchtar, S., & Ilyas, A. (2022). *Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Usm Law Review. Vol (5). No. 2. 493
- Irwan Hafid. (2021). *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law*. Jurnal Lex Reinassan. Vol (6). No. 1
- Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- July Wiarti. (2017). *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)*. UIR Law Review. Vol (7). No. 1
- Lilik Mulyadi. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- M. Sholehuddin. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Malto S. Datuan. (2017). *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. USU law journal, Vol (5). No. 2.
- Mardani. (2009). *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor : Ghalia Indonesia

Matthew P. Harrington. (1994). *Rethinking In Rem: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture*. Yale Law & Policy Review. Vol. (12). No. 2

Nyoman Serikat PJ. (2005). *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Peter Mahmud Marzuki.(2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

PPATK. (2008). *Proceedings: Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset Di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset di Indonesia dengan Linda M. Samuel tanggal 17 dan 18 Juli 2008*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna. (2012). *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu

Salahuddin Wahid. (2018). *Negeri Ramah Terhadap Koruptor*. <https://www.antikorupsi.org/id/article/negeri-ramah-terhadap-koruptor>.

Diakses pada tanggal 20 Oktober 2025

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Soedikno Mertokusumo. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty. h. 203

Sudarto, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih. (2017). *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai*

Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol(5). No.1

Sumaryoto Djoko. (2009). *Pengembalian Kerugian Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya

Theodore S. Greenberg, *et. al.* (2009). *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non- Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: The World Bank

United Nations. (2009). *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime*. Jakarta: UNODC.

Wahyudi Hafiludin Sadeli. (2010). *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Tesis Pascasarjana

Yahya Harahap. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika

Yunus Husein (2008). *Kerugian Negara Dalam Tipikor*. Jakarta: Koran Seputar Indonesia

Yunus Husein,. (2010). *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Asset Forfeiture of Crime in Indonesia)*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. (7). No.4

Zainudin Hasan, *et.al.* (2025). Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *BIROKRASI : Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. Vol (3). No. 1